



**ANALISIS GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

*Gender Analysis in Village Development Planning in Sumberagung Village
Sumberbaru Subdistrict of Jember Regency 2015*

SKRIPSI

Oleh

Lutfi Hadi

NIM 110910201001

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**ANALISIS GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Lutfi Hadi
NIM 110910201001

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Khosyi'in dan Ibu Kholifah yang telah bersabar dan berjuang sekuat tenaga untuk anakmu ini, sehingga saya dapat menikmati pendidikan hingga perguruan tinggi dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak saya Atik Wahyuni dan kakak ipar saya Agus Halim yang telah memberi dukungan serta keponakan saya Mochammad Chasby Syafaa'at yang selalu memberi saya semangat.
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Banyak sekali pergerakan kita yang kandas di tengah jalan karena ketiadaan perempuan di dalamnya.
(Mahatma Gandhi)¹

Development, if not engendered, is endangered.
(UNDP)²

Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih menjadi manusia merdeka.
(Soe Hok Gie)³

¹ Dikutip dari www.rubik.okezone.com/read/1022/wanita-dan-pembangunan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2012. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012*. Jakarta: KPPA.

³ Soe Hok Gie. 2005. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Hadi

NIM : 110910201001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 November 2015

Yang menyatakan,

Lutfi Hadi

NIM 110910201001

SKRIPSI

**ANALISIS GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

*Gender Analysis in Village Development Planning in Sumberagung Village
Sumberbaru Subdistrict of Jember Regency 2015*

Oleh

Lutfi Hadi
NIM 110910201001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 06 November 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

Anggota Penguji

1. Drs. Supranoto, M.Si (.....)
NIP 196102131988021001
2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA (.....)
NIP 197903032005011001
3. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP (.....)
NIP 197410072000121001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015; Lutfi Hadi, 110910201001; 2015; 126 halaman; Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Peneliti mengambil topik ini karena partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa sangat rendah. Selain itu, usulan dari perempuan juga sangat minim. Proses perencanaan pembangunan desa sangat didominasi oleh partisipasi laki-laki dan tidak memperhatikan partisipasi perempuan. Sehingga rencana yang dihasilkan kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Program pembangunan yang dihasilkan cenderung bersifat pembangunan fisik atau infrastruktur. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang berbeda. Sebagai subjek dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap proses pembangunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, fokus penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif, yakni dengan mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tahapan perencanaan pembangunan desa secara normatif dengan perencanaan pembangunan desa yang telah dilaksanakan di Desa Sumberagung. Dari 8 tahapan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, hanya ada 2 tahapan yang dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumberagung, yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pengajuan daftar usulan rencana pembangunan desa. Tidak dilaksakannya beberapa tahapan dalam perencanaan pembangunan di Desa Sumberagung berdampak pada partisipasi perempuan.

Output dari analisis gender adalah perencanaan yang responsif gender. Untuk mewujudkan perencanaan yang responsif gender, dibutuhkan partisipasi dari perempuan. Pada dasarnya partisipasi perempuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kehadiran dan usulan. Dalam pelaksanaan musyawarah dusun, perempuan yang hadir hanya beberapa orang saja. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan musyawarah dusun di beberapa dusun tidak mengundang perempuan. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, perempuan yang hadir hanya dua orang. Pelaksanaan Musrenbangdes mengundang beberapa orang perwakilan perempuan. Dalam pengajuan daftar usulan rencana pembangunan desa, delegasi atau perwakilan desa yang berasal dari kelompok perempuan hanya satu orang.

Selain dilihat dari kehadiran, partisipasi perempuan juga dilihat dari usulan yang diajukan oleh perempuan. Terdapat beberapa usulan dari perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Usulan dari perempuan sebagian besar menggambarkan kepentingan dan kebutuhan strategis perempuan. Namun tidak semua usulan kegiatan dan program pembangunan dari perempuan dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan pemerintah desa lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur atau fisik, seperti perbaikan jalan.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini;
5. Drs. Supranoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Bapak Tugiran selaku Kepala Desa Sumberagung yang telah memberikan izin dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

9. Bapak Sunarto, Bapak Endar, Ibu Komsiyatin, Ibu Winarsih dan seluruh perangkat desa serta seluruh elemen masyarakat Desa Sumberagung;
10. Kedua orang tuaku, yakni Bapakku Khosyi'in, dan Ibuku Kholifah, Kakaku Atik Wahyuni, Kakak Iparku Agus Halim serta Keponakanku Mochammad Chasby Syafa'at yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisipol. Terima kasih atas segala proses pembelajarannya, semoga persaudaraan yang terjalin akan terus terjaga. Yakin Usaha Sampai;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2011 yang telah bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, dari awal kuliah hingga saat ini.
13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 06 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
GLOSARIUM	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat penelitian	17
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pembangunan dan Perempuan.....	19
2.1.1 Perkembangan Pemikiran Pembangunan dan Perempuan	19
2.1.2 Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam Pembangunan.....	23

2.2 Partisipasi Perempuan	24
2.2.1 Pengertian Partisipasi	24
2.2.2 Arti Penting dan Manfaat Partisipasi	24
2.2.3 Partisipasi Perempuan	26
2.3 Analisis Gender	29
2.3.1 Pengertian Gender	29
2.3.2 Peran Gender	30
2.3.3 Kebutuhan Gender	31
2.3.4 Bentuk Kesenjangan Gender	32
2.3.5 Analisis Gender	33
2.4 Perencanaan Pembangunan	35
2.4.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan	35
2.4.2 Pendekatan Belajar Sosial (<i>Social Learning</i>)	37
2.4.3 Kesetaraan Gender dalam Perencanaan	38
2.4.4 Perencanaan Responsif Gender	42
2.5 Perencanaan Pembangunan Desa	43
2.5.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa	43
2.5.2 Tujuan dan Ruang Lingkup	44
2.5.3 Perencanaan Desa Responsif Gender	46
2.6 Kerangka Berfikir	48
BAB 3. METODE PENELITIAN	49
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	49
3.2 Fokus Penelitian	51
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.4 Data dan Sumber Data	52
3.5 Teknik Pemilihan Informan	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data	57
3.8 Teknik Analisis Data	60

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis	63
4.1.2 Kondisi Penduduk (Demografis)	65
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi	65
4.1.4 Sarana dan Prasana.....	67
4.1.5 Organisasi Pemerintah Desa	72
4.2 Gambaran Perencanaan Pembangunan Desa	73
4.2.1 Perencanaan Pembangunan Desa Secara Normatif.....	73
4.2.2 Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung	79
4.2.3 Perbandingan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa	91
4.3 Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.....	96
4.3.1 Gambaran Perempuan Desa Sumberagung	99
4.3.2 Kehadiran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa	102
4.3.3 Usulan Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa	117
BAB 5. PENUTUP	125
5.1 Kesimpulan.....	125
5.2 Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pencapaian IPM Kabupaten di Eks-Karesidenan Besuki	11
1.2 Pencapaian IPG Kabupaten di Eks-Karesidenan Besuki	12
1.3 Pencapaian IDG Kabupaten di Eks-Karesidenan Besuki	13
1.4 Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Kecamatan	14
2.1 Karakteristik Kebutuhan Spesifik, Praktis dan Strategis	31
4.1 Luas Wilayah Desa Sumberagung Berdasarkan Pemanfaatannya	65
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	66
4.4 Sarana & Prasarana Transportasi dan Telekomunikasi	68
4.5 Sarana & Prasarana Pendidikan di Desa Sumberagung.....	69
4.6 Sarana & Prasarana Kesehatan di Desa Sumberagung	70
4.7 Sarana & Prasarana Pemerintah Desa Sumberagung	71
4.8 Daftar Usulan Kegiatan dan Program Pembangunan dalam Musdus di Dusun Tambakrejo	81
4.9 Daftar Usulan Kegiatan dan Program Pembangunan dalam Musdus di Dusun Banjarejo Barat.....	82
4.10 Daftar Usulan Kegiatan dan Program Pembangunan dalam Musdus di Dusun Banjarejo Tengah.....	83
4.11 Daftar Usulan Kegiatan dan Program Pembangunan dalam Musdus di Dusun Banjarejo Timur.....	84
4.12 Daftar Prioritas Kegiatan dan Program Pembangunan Desa Sumberagung Tahun 2015	88
4.13 Delegasi Desa Sumberagung pada Musrenbang Kecamatan.....	89
4.14 Perbandingan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 IPM, IPG dan IDG Nasional Tahun 2005-2013.....	9
1.2 IPM, IPG dan IDG Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2013	10
2.1 Diagram Proses Perencanaan Berwawasan Gender	40
2.2 Skematis Persyaratan Kelayakan Program Pembangunan.....	41
2.3 Kerangka Berfikir	48
3.1 Skema Model Analisis Interaktif.....	61
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberagung.....	72
4.2 Komposisi Peserta Musdus di Dusun Tambakrejo.....	103
4.3 Komposisi Peserta Musdus di Dusun Banjarejo Barat	104
4.4 Komposisi Peserta Musdus di Dusun Banjarejo Tengah.....	105
4.5 Komposisi Peserta Musdus di Dusun Banjarejo Timur.....	107
4.6 Komposisi Peserta Musrenbangdes di Desa Sumberagung	112
4.7 Komposisi Delegasi Desa Sumberagung dalam Musrenbang Kecamatan.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian dari Kecamatan Sumberbaru
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Desa Sumberagung
- Lampiran 8 Berita Acara Musrenbang Desa Sumberagung Tahun 2015
- Lampiran 9 Dokumen Perencanaan Tahunan Hasil Musrenbang Desa Sumberagung Tahun 2015
- Lampiran 10 Daftar Hadir Musrenbang Desa Sumberagung Tahun 2015
- Lampiran 11 Daftar Hadir Musyawarah Dusun Tahun 2015
- Lampiran 12 Pencapaian IPM, IPG dan IDG Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013
- Lampiran 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Lampiran 14 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Lampiran 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lampiran 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Lampiran 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

GLOSARIUM

1. Analisis Gender : Proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan serta faktor yang mempengaruhinya.
2. Bias Gender : Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.
3. Data Terpilah : Data menurut jenis kelamin serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
4. Gender : Perbedaan peran fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat.
5. *Gender Stratification* : Sistem yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hierarkhis pada posisi subordinasi atau tidak sejajar dengan posisi laki-laki.
6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) : Indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen kapabilitas dasar atau kualitas hidup manusia melalui tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen kapabilitas dasar atau kualitas hidup manusia melalui tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : Indikator yang mengukur persamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi serta sumbangan pendapatan.
9. Isu Gender : Suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan kesenjangan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
10. Keadilan Gender (*gender equity*) : Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan perempuan dan laki-laki untuk mendapat kesamaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan.
11. Kebutuhan Praktis Gender : Kebutuhan seseorang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peran gender.
12. Kebutuhan Spesifik Gender : Kebutuhan khas sesuai dengan jenis kelaminnya dan bertujuan untuk melindungi fungsi reproduksi serta melindungi harkat dan martabatnya.

13. **Kebutuhan Strategis Gender** : Kebutuhan yang berawal dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan posisi perempuan atau laki-laki pada sektor publik.
14. **Kesenjangan Gender** : Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan.
15. **Kesetaraan Gender (*gender equality*)** : Kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
16. **Netral Gender** : Kebijakan/ program/ kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
17. **Pengarusutamaan Gender** : Strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. **Peran Gender** : Peran yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dan tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin.
19. **Peran Produktif** : Peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa.
20. **Peran Reproduksi** : Peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan pemeliharaan

- sumberdaya manusia dan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, membersihkan rumah dan berbelanja untuk keperluan sehari-hari.
21. Perencanaan Responsif Gender : Perencanaan yang disusun oleh pemerintah dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan
22. Program Responsif Gender : Program yang berfokus pada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
23. Responsif Gender : Perhatian konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya untuk menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
24. Sensitif Gender : Kemampuan memahami kesenjangan gender, utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Peneliti mengambil topik ini karena partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa sangat rendah. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa seringkali hanya dilihat secara umum dan tidak memperhatikan partisipasi perempuan, sehingga rencana yang dihasilkan kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Perencanaan pembangunan desa sangat didominasi oleh partisipasi laki-laki. Hal tersebut berimplikasi pada usulan program pembangunan yang dihasilkan. Program pembangunan yang dihasilkan cenderung bersifat pembangunan fisik atau infrastruktur. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang berbeda. Sebagai subjek dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap proses pembangunan. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pembangunan pada dewasa ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang. Sedangkan keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara (Laksono, 2013:95). Ul Haq (dalam Hendrarso dan Suyanto, 1996:159), menyatakan bahwa pembangunan manusia yang seutuhnya tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Gender pada hakikatnya mencakup laki-laki dan perempuan. Namun, pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan.

Secara normatif, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sejajar, tetapi dalam kehidupan nyata terjadi yang dinamakan *gender stratification*, yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hierarkhis pada posisi subordinasi atau tidak sejajar dengan posisi laki-laki (Andersen, dalam Gianawati, 2004:1). Adanya subordinasi terhadap perempuan dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, mengharuskan ada penekanan dan perhatian khusus tentang posisi perempuan dalam pembangunan. Adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan disebabkan oleh adanya kesenjangan gender.

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada kenyataannya menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Laksono, 2013:95). Dikaitkan dengan adanya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, terdapat tiga perspektif untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu perspektif mutu modal manusia (*human capital*), perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal serta perspektif gender (Effendi, dalam Santoso, 2004:2).

Perspektif mutu modal manusia (*human capital*) menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi. Tanpa keterlibatan itu sulit bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasib. Pembangunan membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik dalam upaya mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi hidupnya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan.

Perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal menekankan bahwa perempuan adalah aset pembangunan yang belum banyak dimanfaatkan, sehingga selama ini terjadi inefisiensi dalam pembangunan. Atas dasar inilah kaum

perempuan perlu dimanfaatkan secara penuh dengan melibatkan mereka melalui ekspansi industri kapitalis negara maju ke negara berkembang. Hal tersebut membuka peluang keterlibatan kaum perempuan di pasar kerja untuk mendapatkan upah. Dengan demikian mereka dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi.

Perspektif gender menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak lahir dan akhirnya melahirkan ketidakadilan yang menjelekkan dalam berbagai perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut perspektif ini, penyebab kesenjangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan seperti perspektif *human capital* tetapi lebih disebabkan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender. Manifestasi ideologi ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan.

Pembangunan adalah usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, dalam Ndraha, 1990:11). Sedangkan Todaro (dalam Bryant dan White, 1987:4) mendefinisikan pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, dapat dirumuskan pembangunan yang efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Karena pada dasarnya kebutuhan lebih besar dari sumberdaya yang ada. Huraerah (2011:80) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha sadar, terorganisasi dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjelaskan bahwa “perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 2 ayat 4, dijelaskan tujuan perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut ini.

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Maksud dari partisipasi masyarakat disini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mubyarto (dalam Huraerah, 2011:110) mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat mulai ikut terlibat mulai tahap penyusunan program, perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut lagi, Midgley (dalam Muluk, 2007:49)

memperjelas pengertian partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB, yang mendefinisikan partisipasi sebagai berikut.

"participation is the creation of opportunities to enable all members of a community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development" (Partisipasi adalah penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan memengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata).

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan masyarakat. Pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat merupakan usaha nyata untuk memberdayakan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal. Jadi masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan saja, melainkan juga menjadi subjek pembangunan yang berperan aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan sangat membantu pemerintah untuk menentukan kegiatan dan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada hakikatnya partisipasi merupakan hak yang wajib diterima oleh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagai hak, partisipasi masyarakat termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28d ayat 3 yang berbunyi "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan pasal 28e ayat 3 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Secara normatif, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, kenyataan pada saat ini menunjukkan bahwa partisipasi

perempuan dalam pembangunan sangat terbatas. Rendahnya akses perempuan dan adanya subordinasi terhadap perempuan merupakan penyebab terbatasnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dengan diratifikasi dan diundangkannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, maka perempuan di Indonesia memiliki perundang-undangan yang bersifat melindungi dan menjamin perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Pada pasal 14 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah menjamin perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di segala tingkat.

Keberhasilan dari proses pembangunan akan sangat tergantung pada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembangunan. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali hanya dilihat secara umum dan tidak dilihat dari perspektif gender. Menurut Overhalt (dalam Muluk dkk, 2011:22), perencanaan pembangunan telah gagal mengenali secara keseluruhan atau secara sistematis kontribusi perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ke depan harus memprioritaskan usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Rahardjo (dalam Ihromi, 1995:4) mengatakan bahwa banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari perencanaan telah keliru dalam hal-hal berikut ini.

1. Gagal memperhatikan peran produktif perempuan yang secara tradisi telah dimainkannya.
2. Mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat di mana aktivitas perempuan dibatasi oleh tugas-tugas rutin rumah tangga.
3. Meresapnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat yang sedang berkembang.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan *top down* (atas-bawah) dan *bottom up* (bawah-atas). Pendekatan dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil dari perencanaan diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di semua jenjang pemerintahan, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan di semua jenjang pemerintahan saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Conyers (dalam Muluk, 2007:24) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi yang paling penting dan yang paling disarankan adalah partisipasi masyarakat pada level desa.

Desa merupakan satuan unit pemerintah terkecil di mana masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi di dalamnya. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, kedudukan desa sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didominasi oleh pemerintahan yang berbentuk desa. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2014, terdapat 72.944 wilayah berbentuk desa dan 8.309 wilayah berbentuk kelurahan. Dengan jumlah desa yang sangat banyak ini, Desa diharapkan menjadi garda terdepan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Setiap pembangunan yang dilaksanakan desa didasarkan pada perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut.

“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan rencana pembangunan yang disusun untuk jangka waktu enam tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun untuk jangka waktu satu tahun. RPJM Desa tidak bisa dipisahkan dari RKP Desa. Program pembangunan yang ada dalam RKP Desa tidak boleh bertentangan dan harus terintegrasi dengan RPJM Desa. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan desa harus berpedoman pada dokumen RPJM Desa.

Penekanan terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada pasal 8 ayat 4 dijelaskan bahwa pembentukan tim penyusun rencana pembangunan desa harus mengikutsertakan perempuan. Pada pasal 46 ayat 3, dijelaskan bahwa kelompok perempuan merupakan unsur masyarakat yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya pada pasal 40 ayat 3, dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan desa harus mengikutsertakan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 54, dijelaskan bahwa perempuan merupakan unsur masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peningkatan partisipasi perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya dan kualitas hidup perempuan. Untuk mengetahui kualitas sumberdaya dan kualitas hidup perempuan, dapat menggunakan 3 indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen kapabilitas dasar atau kualitas hidup manusia melalui tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG juga mengukur kapabilitas dasar atau kualitas hidup manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan

perempuan. Melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin rendah rasio IPG terhadap IPM maka semakin besar kesenjangan gender dalam pembangunan (Laksono, 2013:97).

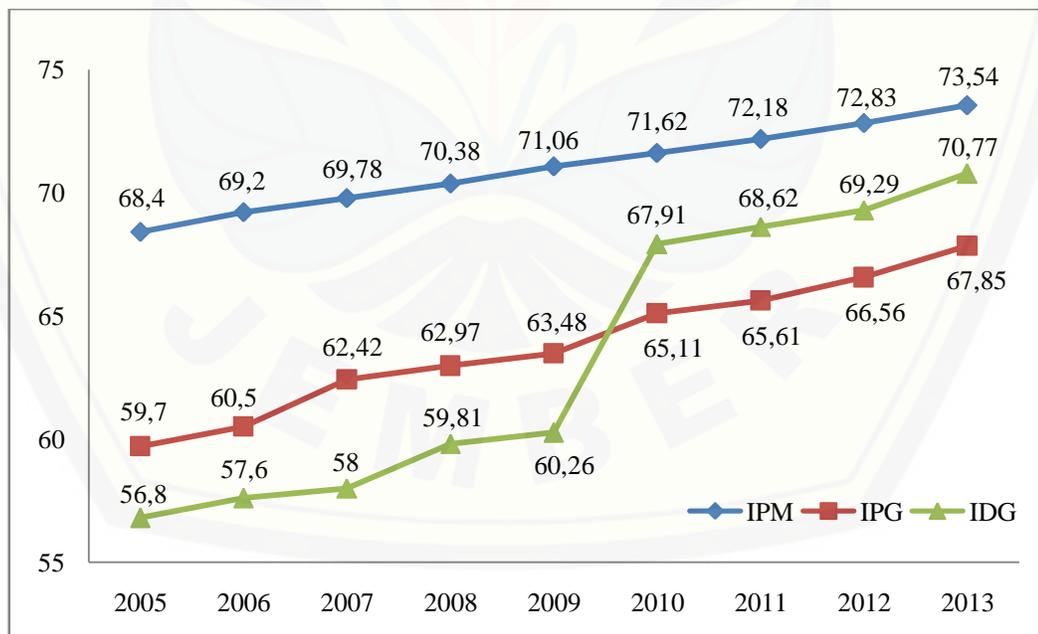
Tingkat pembangunan yang berbasis gender juga dapat dilihat dari persamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang dapat dilihat melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG diukur berdasarkan peran perempuan dalam tiga bidang, yaitu ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, UNDP mengelompokkan tingkatan pembangunan manusia ke dalam 4 kategori, yaitu kelompok tinggi (IPM/IPG/IDG >80), kelompok menengah atas (IPM/IPG/IDG 66<x<80), kelompok menengah bawah (IPM/IPG/IDG 50<x >66) dan kelompok rendah (IPM/IPG/IDG <50).



Gambar 1.1 IPM, IPG dan IDG Nasional Tahun 2005-2013
(Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dikutip Tahun 2015)

Dari gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa IPM, IPG dan IDG Nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori menengah atas. IPM Nasional merupakan yang paling tinggi dibandingkan IPG dan IDG. Tingginya IPM dibandingkan dengan IPG dan IDG menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah dibandingkan dengan peran laki-laki.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipenghujung tahun 2014 memperoleh penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan dari pemerintah pusat berupa Anugerah Mentor Parahita Ekapraya 2014. Provinsi Jawa Timur berhasil mengantarkan 9 dari 10 Kabupaten/ Kota menjadi sasaran penilaian tim verifikasi (www.birohumas.jatimprov.go.id diakses pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 08.21). Diraihnya penghargaan ini menggambarkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis gender.



Gambar 1.2 IPM, IPG dan IDG Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2013
(Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dikutip Tahun 2015)

Dari gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun pencapaian IPM, IPG dan IDG Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori menengah atas. Namun, kesenjangan gender masih cukup tinggi. Kesenjangan gender dapat dilihat dari rasio antara IPM dan IPG. Kesenjangan yang terjadi pada pencapaian IPM dan IPG menunjukkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembangunan berbasis gender belum sesuai dengan harapan. IPG Jawa Timur pada Tahun 2013 yaitu 72,38 masih dibawa rata-rata IPG Nasional, yaitu 73,29. Selain melihat rasio antara IPM dan IPG, hasil dari pembangunan gender juga dapat dilihat melalui IDG. Pencapaian IDG Provinsi Jawa Timur memang lebih rendah dengan pencapaian IPM. Namun, Berbeda dengan pencapaian IPM dan IPG yang selalu berada di bawah tingkat nasional, IDG Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 melampaui capaian IDG Nasional. Hal tersebut menggambarkan bahwa peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Provinsi Jawa Timur semakin meningkat.

Terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang memiliki pencapaian IPM, IPG dan IDG di bawah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah Kabupaten Jember. Dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi di Jawa Timur, IPM Kabupaten Jember hanya lebih baik dibandingkan 5 Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang dan Probolinggo. Pencapaian IPM Kabupaten yang ada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki sangat rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bahkan dari beberapa Kabupaten yang memiliki IPM terendah di Provinsi Jawa Timur, sebagian besar berasal dari wilayah Eks-Karesidenan Besuki.

Tabel 1.1 Pencapaian IPM Kabupaten di Eks-Karesidenan Besuki Tahun 2013

No.	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.	Banyuwangi	71.02
2.	Jember	66.60
3.	Situbondo	65.73
4.	Bondowoso	65.39

Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dikutip Tahun 2015.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pencapaian IPM Kabupaten Jember kalah jauh dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi. IPM Kabupaten Jember hanya sedikit lebih baik dari Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. IPM Kabupaten Jember termasuk dalam kategori menengah atas. Meskipun berada dalam kategori menengah atas, pencapaian IPM Kabupaten Jember berada tepat pada nilai terendah dalam kategori menengah atas, yakni 66 dan hanya terpaut sedikit dengan kategori menengah bawah. Rendahnya pencapaian IPM Kabupaten yang ada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki atau yang sering disebut daerah tapal kuda ini diikuti dengan rendahnya pencapaian IPG. Pencapaian IPG Kabupaten yang ada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki sangat rendah jika dibandingkan dengan pencapaian IPG Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota lain yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut ini pencapaian IPG dari Kabupaten yang ada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki.

Tabel 1.2 Pencapaian IPG Kabupaten di Eks-Karesidenan Besuki Tahun 2013

No.	Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1.	Banyuwangi	63.82
2.	Bondowoso	61.18
3.	Jember	58.43
4.	Situbondo	54.64

Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dikutip Tahun 2015.

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pencapaian IPG Kabupaten Jember tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan IPM. IPG Kabupaten Jember termasuk dalam kategori menengah bawah. Dari seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, IPG Kabupaten Jember hanya lebih baik dibandingkan dengan 5 (lima) Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Lumajang, Bojonegoro, Situbondo, Sampang dan Probolinggo. IPG Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Eks-Karesidenan Besuki, lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo. Rendahnya IPG Kabupaten Jember menggambarkan rendahnya kapabilitas dasar atau kualitas hidup perempuan.

Kesenjangan gender dalam pembangunan juga dapat dilihat melalui pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tidak jauh seperti IPM dan IPG, pencapaian IDG Kabupaten yang berada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki juga cukup rendah jika dibandingkan pencapaian IDG Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota lain yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut ini pencapaian IDG Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

Tabel 1.3 Pencapaian IDG Kabupaten di Eks-Karesidenan Besuki Tahun 2013

No.	Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1.	Situbondo	68.26
2.	Banyuwangi	66.89
3.	Bondowoso	56.26
4.	Jember	53.54

Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dikutip Tahun 2015.

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pencapaian IDG Kabupaten Jember termasuk dalam kategori menengah bawah dan merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di wilayah Eks-Karesidenan Besuki. Bahkan pencapaian IDG Kabupaten Jember sangat jauh jika dibandingkan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Padahal jika dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, Kabupaten Jember jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Rendahnya IDG Kabupaten Jember menggambarkan betapa rendahnya peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Dari beberapa gambaran pembangunan gender yang ditunjukkan melalui beberapa indeks komposit di atas, yaitu IPM, IPG dan IDG menunjukkan bahwa kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis gender. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan atau kesenjangan gender dalam pembangunan. Sehingga pembangunan yang berbasis gender merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan di Kabupaten Jember. Permasalahan lain terkait dengan pembangunan berbasis gender di

Kabupaten Jember adalah tidak adanya indikator pembangunan berbasis gender di tingkat yang lebih bawah yaitu kecamatan dan desa, menyebabkan sulitnya mengetahui tingkat pembangunan gender secara keseluruhan.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan pihak yang kurang diuntungkan dari proses pembangunan. Padahal keberadaan perempuan yang secara absolut lebih besar dari laki-laki, merupakan potensi yang harus optimalkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, jumlah penduduk Kabupaten Jember pada Tahun 2014 adalah 2.357.469 orang yang terdiri 1.210.037 orang penduduk perempuan atau sekitar 51.32% dan 1.165.432 orang penduduk laki-laki atau sekitar 48.68%. Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan. Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, semua Kecamatan memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Kecamatan Sumberbaru merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak di Kabupaten Jember, khususnya untuk wilayah Kabupaten Jember bagian barat.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Penduduk Perempuan
1.	Sumberbaru	52.034
2.	Tanggul	43.163
3.	Umbulsari	33.858
4.	Kencong	33.834
5.	Jombang	26.012
6.	Sembo	22.502

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Dikutip Tahun 2015.

Salah satu usaha untuk mengoptimalkan perempuan adalah dengan mengikutsertakannya dalam setiap tahapan pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang saat ini masih rendah. Dalam konteks pembangunan desa, peran dan partisipasi perempuan dapat dilihat dari suatu organisasi khusus perempuan yang ada di Desa, yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan sebuah

organisasi kemasyarakatan desa yang diharapkan mampu menggerakkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. PKK bertujuan untuk membangun relasi antara laki-laki dan perempuan yang setara dan adil.

Kegiatan-kegiatan PKK merupakan penjabaran dari 10 program pokok PKK yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember mengadakan lomba 10 program pokok PKK setiap tahun. Setiap Kecamatan diwakili oleh satu desa. Kecamatan Sumberbaru menunjuk Desa Sumberagung menjadi perwakilan dalam lomba 10 program pokok PKK. Penunjukkan Desa Sumberagung untuk mewakili Kecamatan Sumberbaru dalam lomba 10 program pokok PKK bukan tanpa alasan. Perempuan Desa Sumberagung dinilai paling aktif dalam setiap kegiatan PKK dan paling siap menjadi perwakilan dalam lomba 10 program PKK tingkat Kabupaten. Oleh karena itu peneliti memilih Desa Sumberagung menjadi lokasi penelitian.

Desa Sumberagung telah melakukan perencanaan pembangunan desa, yaitu berupa Rencana pembangunan desa yang dilakukan pada pertengahan bulan Januari Tahun 2015. Perencanaan pembangunan desa diharapkan memperhatikan aspek gender, agar laki-laki maupun perempuan mempunyai posisi yang sama, baik sebagai subjek maupun objek dari pembangunan. Namun kenyataan dilapangan, menunjukkan bahwa aspek gender tidak diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilihat secara umum. Hal tersebut dapat kita ketahui dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Endar Murdyanto selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan (Kaur Ekbang) Desa Sumberagung pada tanggal 17 April 2015 pukul 14.00 WIB.

“Terdapat beberapa usulan dan program yang akan dilaksanakan oleh desa. Tapi kita tidak membedakan mana usulan dari perempuan atau laki-laki dan kita juga tidak membedakan mana usulan program untuk perempuan atau laki-laki. Pokoknya kita jadikan satu semua. Yang jelas semua warga boleh usul. Selain itu, tingkat kehadiran perempuan dalam musyawarah juga sangat rendah mas. Jadi, usulan dari perempuan juga tidak terlalu banyak”.

Dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan desa dilihat secara umum dan partisipasi perempuan sangat rendah. Pembangunan yang dilihat secara umum ini sangat rentan menimbulkan diskriminasi dan merugikan salah terhadap salah satu pihak, khususnya perempuan. Selain itu, terdapat beberapa usulan dari perempuan yang tidak dimasukkan dalam rencana pembangunan desa. Wawancara peneliti dengan salah satu perempuan Desa Sumberagung, pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 14.30 WIB.

“Waktu musdus kemarin, saya dan teman-teman mengusulkan pelaksanaan simpan pinjam dan keterampilan pembuatan kue mas. Kalau simpan pinjam itu nanti ada hubungannya sama PNPM mas. Dengan adanya simpan pinjam, dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat mas, khususnya perempuan. Sedangkan keterampilan pembuatan kue dapat menunjang perekonomian keluarga mas”.

Dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa usulan dari perempuan yang tidak diperhatikan dan tidak dimasukkan dalam rencana pembangunan. Adanya kenyataan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa sangat rendah dan terdapat beberapa usulan perempuan yang tidak dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2001:62), masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah sangat diperlukan untuk merumuskan sebab yang menimbulkan gejala penelitian

secara jelas. Sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap masalah penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas termasuk penelitian memiliki tujuan tertentu, karena tujuan merupakan arah pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan adanya tujuan, penelitian dapat lebih terarah. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan adalah mendeskripsikan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015.

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat Pribadi

Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan, penalaran dan pengetahuan peneliti melalui aplikasi teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan bisa memberikan referensi, rekomendasi dan studi kepustakaan untuk penelitian sejenis serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya perencanaan pembangunan.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan desa serta memberikan manfaat dalam rangka penyusunan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ilmiah tidak bisa dipisahkan dari teori. Menurut Kerlinger (dalam Creswell, 2010:79), teori adalah seperangkat konstruk (variabel-variabel), definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang saling berhubungan serta mencerminkan pandangan sistematis atas suatu fenomena dengan cara merinci hubungan antar variabel yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena alamiah. Snelbecker (dalam Moleong 2001:34) menjelaskan teori sebagai berikut.

“teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi dengan cara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan serta menjelaskan fenomena yang dapat diamati”.

Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai sumber untuk mencari informasi awal mengenai topik penelitian dan sebagai pembanding atas hasil penelitian. Menurut Turner (dalam Sudjana dan Kusumah, 2002:8), teori mengandung empat elemen, yaitu konsep, variabel, pernyataan dan format. Konsep merupakan abstraksi dari serangkaian peristiwa yang memiliki sifat-sifat yang sama. Konsep atau disebut juga konstruk dapat diartikan sebagai abstraksi yang dijabarkan dari berbagai aspek tingkah laku manusia yang bervariasi di antara berbagai individu (Moore, dalam Sudjana dan Kusumah, 2002:8). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep, yang di antaranya berikut ini.

1. Pembangunan dan Perempuan
2. Partisipasi Perempuan
3. Analisis Gender
4. Perencanaan Pembangunan
5. Perencanaan Pembangunan Desa

2.1 Pembangunan dan Perempuan

2.1.1 Perkembangan Pemikiran Pembangunan dan Perempuan

Berbagai pendekatan pembangunan yang diperuntukkan perempuan dalam setiap kerangka dasar pembangunan dibahas untuk mengungkapkan perubahan pendekatan yang membahas pembangunan dan perempuan. Pembangunan sebagai usaha yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat senantiasa memberi perhatian terhadap peranan perempuan. Dua kecenderungan timbul dari kondisi tersebut (Bemmelen dalam Ihromi, 1995:176). Pertama, telah terjadi pergeseran perhatian peran perempuan dari peran reproduktif ke peran produktif. Kedua, di samping masalah bagaimana sumbangan atau kontribusi perempuan dalam pembangunan, masalah bagaimana menjamin perempuan memperoleh manfaat dan keuntungan dari pembangunan yang sama dengan yang diperoleh oleh laki-laki semakin menjadi pusat perhatian. Dalam kajian pembangunan dan perempuan, terdapat beberapa pendekatan yang mempunyai implikasi pada posisi perempuan dalam pembangunan. Berikut ini beberapa pendekatan pembangunan dan perempuan.

a. Pendekatan Persamaan

Pendekatan persamaan merupakan salah satu kritik atas pendekatan modernisasi dalam teori pembangunan dunia ke tiga. Sejak tahun 1970-an tampak jelas bahwa strategi modernisasi tidak berhasil menghapus kemiskinan. Pada saat itu menjadi sangat jelas dari analisis Boserup (dalam Mosse, 1996:198), bahwa perempuan yang tidak tersentuh oleh program pembangunan sebenarnya justru dirugikan oleh program-program pembangunan tersebut. Analisis Boserup ini diberlakukan tidak hanya kepada kaum miskin pada umumnya, tetapi perempuan pada khususnya. Argumen yang mengemuka adalah jika kerja tradisional perempuan tidak diakui sebagai bagian dari perekonomian nasional, diperlukan upaya untuk memberikan kepada mereka pekerjaan yang bisa dinilai yaitu, mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan. Gagasan mengenai persamaan menjadi kriteria penting bagi pemikiran tentang apa yang dibutuhkan perempuan dari pembangunan. Menurut Moser (dalam Mosse, 1996:200), program pembangunan

yang peduli terhadap perempuan merupakan sesuatu yang berkembang dari pendekatan persamaan. Pendekatan persamaan ini memandang tiga unsur penting, yakni sebagai berikut.

1. Pengakuan terhadap nilai ekonomi kerja perempuan yang dibayar dan tidak dibayar.
 2. Pengakuan bahwa sebagian besar pembangunan berpengaruh merugikan kepada perempuan
 3. Argumen bahwa pengejaran terhadap persamaan akan menyelesaikan masalah perempuan dalam pembangunan.
- b. Pendekatan Antikemiskinan

Akhir tahun 1960-an, tampak jelas bahwa kelompok miskin tetap miskin dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Pendekatan antikemiskinan terhadap perempuan dalam pembangunan menggunakan kemiskinan sebagai pangkal tolak pemikiran dari pada isu subordinasi sebagai sumber ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan antikemiskinan ini dibangun untuk memperbaiki pendapatan kaum perempuan miskin. Pendekatan antikemiskinan menitikberatkan perhatian pada peningkatan penghasilan bagi perempuan melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif, seperti tanah dan kredit. Kebijakan atau program peningkatan pendapatan bagi perempuan jarang diperlakukan seserius kebijakan atau program peningkatan penghasilan bagi laki-laki, meski proyek peningkatan pendapatan juga menawarkan kemungkinan memberdayakan perempuan. Beberapa kritik pada pendekatan ini adalah sebagai berikut (dalam Mosse, 1996:202).

1. Proyek ini hanya sedikit sekali memepertimbangkan fakta bahwa perempuan telah siap diberi beban kerja yang berlebihan.
2. Kebebasan bagi kebanyakan perempuan sangat terbatas.
3. Kapasitas sektor informal untuk menghasilkan pekerjaan dan pertumbuhan juga terbatas.

c. Pendekatan *Women in Development* (WID)

Pendekatan *Women in Development* (WID) muncul sebagai suatu kritik terhadap teori *developmentalism*. Teori *developmentalism* mengemukakan bahwa pembangunan disistribusikan kepada masyarakat terbatas, dengan asumsi bahwa kesejahteraan yang diciptakan oleh pembangunan akan menetes kepada masyarakat lain yang belum berkesempatan menikmati hasil dari pembangunan. Masyarakat yang terpilih untuk mendapatkan distribusi dari pembangunan bermakna laki-laki, bukan perempuan karena laki-laki dianggap lebih mampu menghasilkan pemasukan bagi keluarga. *Trickle down effect* yang diharapkan dari adanya distribusi pembangunan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dalam konteks hubungan sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan terdapat jurang kesenjangan yang cukup lebar. Pada tahun 1970-an, WID mulai menandingi teori *trickle down effect* dari pembangunan, dengan argumentasi bahwa modernisasi mempunyai dampak berbeda pada laki-laki dan perempuan. Bukannya semakin meningkatkan hak dan status perempuan, proses pembangunan yang ada akan hanya mengesampingkan perempuan dan yang paling buruk adalah semakin memperparah posisi perempuan (Nugroho, 2008:72). Menurut Bemmelen (dalam Ihromi, 1995:192), inti dari pendekatan WID yang paling khas adalah perhatiannya kepada sumbangan produktif perempuan terhadap pembangunan.

d. Pendekatan *Women and Development* (WAD)

Pendekatan *Women and Development* (WAD) merupakan pendekatan pada akhir 1970-an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. Pendekatan WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Jadi setelah WID terimplementasi kemudian beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan. WAD tidak membahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan, karena sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar. Bukannya menitikberatkan pada usaha untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, pendekatan ini justru menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi dan kerja yang dilakukannya dalam rumah

tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. Perempuan menjadi subyek dalam pembangunan. WAD cenderung kurang mengindahkan program khusus perempuan dan menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga (Mosse, 1996:208).

e. Pendekatan *Gender and Development* (GAD)

Pendekatan *Gender and Development* (GAD) merupakan paradigma baru dalam meletakkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. GAD merupakan pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan oleh perempuan (produktif, reproduksi dan sosial). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam analisisnya terhadap asal dinamika dan struktur penindasan perempuan serta bagaimana pendekatan itu berniat mengubah posisi perempuan. WAD memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan regulasi yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri (dalam Mosse, 1996:209).

Strategi dari pendekatan GAD adalah bekerja ke arah terwujudnya keadilan berkenaan dengan dampak dari pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan harus memberi hasil yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, sekalipun apa yang diperoleh perempuan dari pembangunan tidak selamanya sama dengan apa yang diperoleh oleh laki-laki. Sebagai strategi, potensi GAD untuk memberi manfaat yang adil kepada perempuan sangat besar. GAD sejajar dengan gagasan tentang keadilan pada umumnya dan keadilan gender pada khususnya (Bemmelen, dalam Ihromi, 1995:208).

2.1.2 Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam Pembangunan

Perkembangan pemikiran mengenai perempuan dalam pembangunan berkaitan dengan beberapa aspek kunci dalam pembangunan, yaitu akses, partisipasi, manfaat, kontrol dan manfaat dalam pembangunan. Berbagai pendekatan pembangunan di atas menggambarkan perkembangan pembangunan mulai dari pembangunan yang bias gender atau pembangunan yang mengabaikan perempuan, hingga pembangunan yang responsif gender atau pembangunan yang memperhatikan posisi perempuan. Beberapa pendekatan pembangunan tersebut juga menggambarkan seberapa besar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dari proses pembangunan, di mana aspek tersebut sangat menentukan bagaimana posisi perempuan dalam pembangunan.

1. Akses diartikan sebagai *“the capacity to use the resources necessary to be a fully active and productive, as socially, economically and politically participant in society, including access to resources, services, labor and employment, information and benefits”* (dalam Puspitawati, 2013:6). Akses berkaitan dengan seberapa besar pembangunan menciptakan ruang atau kesempatan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Partisipasi diartikan sebagai *“who does what?”* (siapa melakukan apa). Partisipasi berkaitan dengan seberapa besar pembangunan melibatkan atau mengikutsertakan laki-laki maupun perempuan secara adil dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya pembangunan.
3. Kontrol diartikan sebagai *“who has what?”* (siapa mempunyai apa). Kontrol berkaitan dengan seberapa besar pembangunan memberikan kekuasaan atau wewenang secara adil kepada laki-laki dan perempuan dalam menggunakan atau memanfaatkan sumberdaya pembangunan.
4. Manfaat diartikan sebagai *“who gets what?”* (siapa mendapatkan apa). Berkaitan dengan seberapa besar pembangunan memberikan hasil yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

2.2 Partisipasi Perempuan

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Penggerakkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangunan (Bhattacharrya, dalam Ndraha, 1990:101). Uphoff (dalam Santoso dan Gianawati, 2005:1) mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dan ikut dalam mengevaluasinya. Sedangkan Davis (dalam Huraerah: 2011:109), mendefinisikan partisipasi sebagai berikut.

“as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility them” (Keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggungjawab terhadapnya).

Bryant & White (dalam Muluk, 2007:46) menggambarkan pengertian partisipasi yang lebih mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh masyarakat atau oleh penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Pengertian partisipasi ini mengandung makna sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan orang lain, perhatian yang mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat, serta kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak lain terhadap suatu kegiatan.

2.2.2 Arti Penting dan Manfaat Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Conyers (1984:154) menjelaskan alasan pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut ini.

“Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat program-program serta proyek-proyek pembangunan akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program pembangunan tersebut sehingga akan menimbulkan rasa kepemilikan terhadap obyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan”.

Mills dan Lee (dalam Muluk, 2007:5) menjelaskan bahwa arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi masyarakat tidak akan mengancam stabilitas politik dan seyogyanya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Masih dalam buku yang sama, Antoft dan Novack (dalam Muluk, 2007:5) mengatakan bahwa arti penting partisipasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat, yang dapat dipetik darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan membawa banyak manfaat. Manfaat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut (Santoso dan Gianawati (2005:19).

- a. efektif, karena masyarakat lokal lebih memahami kondisi, potensi, kebutuhan dan permasalahannya.
- b. efisien, karena sumberdaya serta kemauan local dapat dipergunakan, serta keterlibatan masyarakat sejak awal membantu perencanaan yang disusun tepat sasaran.
- c. menjalin kemitraan, karena akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku pembangunan.
- d. memberdayakan kapasitas, terjalin lewat upaya dialog dan pengelolaan pembangunan.
- e. memperluas ruang lingkup, karena masyarakat akan memahami tanggungjawabnya dan berusaha mengembangkan aktivitas pembangunan.
- f. meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, karena akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dari berbagai program pembangunan.
- g. berkelanjutan, karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil pembangunan.
- h. pemberdayaan kelompok marjinal, karena mereka memiliki kesempatan untuk dapat berperan dalam menentukan kegiatan pembangunan.
- i. meningkatkan akuntabilitas, karena jika dilakukan secara sungguh-sungguh akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2.2.3 Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan isu yang sudah diwacanakan sejak lama. Namun, partisipasi perempuan dalam pembangunan tetap menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan kenyataan pada saat ini yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. Persoalan budaya, politik dan konstruksi masyarakat merupakan beberapa hal yang menjadikan kenapa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Achmad (dalam Ihromi, 1995:255), mengatakan bahwa perempuan sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan. Melalui partisipasinya dalam semua bidang dan dalam setiap kegiatan, dari tingkat pelaksana sampai tingkat perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, mampu sebagai pemerata kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pembangunan serta penikmat hasil-hasil pembangunan.

Moser (dalam Mosse, 1992:200), mengatakan bahwa perempuan seharusnya menjadi partisipan aktif dalam setiap proses pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduksinya memberikan kontribusi kritis meski tidak diakui terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi perempuan bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan dan permasalahan yang mereka hadapi mendapatkan perhatian khusus, yang diwujudkan dalam kegiatan dan program pembangunan yang responsif gender. Menurut Hendrarso (dalam Hendrarso dan Suyanto, 1996:161), kegiatan dan program pembangunan yang hanya mementingkan partisipasi laki-laki beresiko menimbulkan kesenjangan dan inefisiensi dalam pembangunan. Dengan keberadaannya yang secara absolut lebih besar dari pada laki-laki, perempuan bukanlah beban dalam pembangunan, melainkan potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Caranya tentu saja bukan dengan membiarkan perempuan tetap terpuruk, tetapi sesegera mungkin harus dilakukan upaya untuk memberdayakan perempuan agar sejajar dengan laki-laki dalam proses pembangunan. Salah satu langkah untuk memberdayakan perempuan adalah dengan mengikutsertakannya dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan mengikutsertakan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, setidaknya terdapat dua manfaat, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien

Perempuan mempunyai permasalahan, kepentingan, kebutuhan dan pengalaman yang khas dan sangat berbeda dengan laki-laki. Perempuan mempunyai peran produktif dan peran reproduktif dalam keluarga. Perempuan mempunyai peran dan perhatian khusus terhadap keluarga dan keluarganya. Pengalaman dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam rumah tangga maupun ranah publik, membuat perempuan menjadi manajer terbaik. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kesejahteraan yang lebih luas akan meningkat.

2. Mengurangi kesenjangan itu sendiri

Partisipasi perempuan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka menyuarakan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Usulan dari perempuan berupa kegoatan atau program yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Pemberdayaan perempuan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki.

Perempuan merupakan subyek yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Laki-laki dan perempuan harus mempunyai akses dan peran yang sama dalam pembangunan, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Keberhasilan dari proses pembangunan akan sangat tergantung pada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembangunan. Setiap proses pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masih didominasi oleh peran dan partisipasi dari kaum laki-laki. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan belum mempertimbangkan manfaat yang adil bagi perempuan. Dalam setiap tahapan pembangunan, perempuan diharapkan berpartisipasi dalam 6 bentuk, yaitu sebagai berikut (Buchori dkk, 2002:3).

1. Sebagai pengusul, perempuan mengajukan usulan kegiatan dan program pembangunan untuk mengatasi persoalan, memenuhi kepentingan dan kebutuhan prioritas mereka.
2. Sebagai pengambil keputusan, perempuan hadir dan mengemukakan ide, usulan atau pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Sebagai pelaksana kegiatan, perempuan dapat ikut berperan sebagai tenaga kerja, anggota Tim Pelaksana Kegiatan atau anggota Unit Pengelola Keuangan, atau sesuai keinginan dan kemampuannya.
4. Sebagai pemantau, perempuan ikut memantau hasil kerja dan secara aktif seperti meminta laporan pertanggungjawaban keuangan program, serta melakukan tindakan tegas jika menemukan kecurangan di lapangan.

5. Sebagai pemelihara, perempuan ikut memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana, atau bisa juga menjadi anggota Tim Pemelihara.
6. Sebagai penerima manfaat, perempuan bisa menjadi penerima modal usaha maupun menikmati hasil pembangunan berupa sarana dan prasarana yang menggunakan sumberdaya pembangunan.

2.3 Analisis Gender

2.3.1 Pengertian Gender

Gender bukanlah isu baru dalam kajian ilmu sosial. Namun gender tetap menjadi isu yang menarik dan aktual untuk dibahas. Hal tersebut tidak lepas dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep gender dan masih banyaknya fenomena-fenomena kesenjangan gender yang terjadi disekitar kita. Istilah gender seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin, padahal pemahaman tersebut sangat kontradiktif dengan makna yang sebenarnya. Gender berasal dari bahasa latin, yaitu *genus* yang berarti ras, keturunan, golongan atau kelas. Butler dalam *Gender Trouble* (dalam Nugroho, 2008:33), menjelaskan gender sebagai berikut.

“Gender adalah sebuah identitas yang dibentuk oleh waktu, dikembangkan dalam suatu eksterior ruang yang melalui serangkaian kegiatan khas (*styled repetition of acts*) yang berulang. Efek dari gender diproduksi melalui kegiatan khas tersebut yang akhirnya membentuk ilusi-ilusi yang mengikat gender itu sendiri”.

Oakley (dalam Fakhri, 2012:71), mendefinisikan gender sebagai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Sedangkan jenis kelamin merupakan perbedaan yang didasarkan pada faktor biologis yang merupakan kodrat dari Tuhan sehingga bersifat permanen. Achmad (dalam Ihromi, 1995:171), menjelaskan bahwa gender sebagai suatu konsepsi lebih tepat untuk dipergunakan dalam membahas permasalahan pembangunan dari pada jenis kelamin. Gender sebagai suatu konsepsi mengacu pada pengertian bahwa dilahirkan

sebagai laki-laki atau perempuan keberadaannya berbeda dalam waktu, tempat, kultur, bangsa maupun peradaban. Gender adalah interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan antara laki-laki dan perempuan interpretasi mental ini lebih merupakan keadaan ideal daripada apa yang sesungguhnya dilakukan dan dapat dilihat serta diamati. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki maupun perempuan.

2.3.2 Peran Gender

Konsep gender diartikan sebagai suatu konsep hubungan sosial yang yakni membedakan peranan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh norma dan nilai sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, peran gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka peran gender dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan norma dan nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dapat berubah dari masa ke masa sesuai dengan kemajuan pendidikan teknologi, ekonomi dan sebagainya dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa peran gender bersifat dinamis. Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal tiga peran gender, yakni sebagai berikut (Komariyah, 2008:3).

1. Peran produktif (peran disektor publik) adalah peran yang dilakukan laki-laki maupun perempuan menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan.
2. Peran reproduktif (peran disektor domestik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumberdaya manusia dan urusan rumah tangga. Seperti mengasuh anak, membersihkan rumah dan berbelanja untuk keperluan sehari-hari.
3. Peran sosial adalah peran yang dijalankan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

2.3.3 Kebutuhan Gender

Perbedaan biologis dan perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, sikap dan perilaku antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Menurut Nurhaeni (2013:5), terdapat tiga macam kebutuhan yang berkaitan dengan gender, yakni kebutuhan spesifik, kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis.

Tabel 2.1 Karakteristik Kebutuhan Spesifik, Praktis dan Satrategis

Kategori	Kebutuhan Spesifik	Kebutuhan Praktis	Kebutuhan Strategis
Pengertian	Kebutuhan khas sesuai dengan jenis kelaminnya	Kebutuhan seseorang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peran gender	Kebutuhan yang berawal dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat
Fokus	Perempuan dan laki-laki	Perempuan	Relasi antara perempuan dan laki-laki
Cara mengidentifikasi kebutuhan	Diformulasikan dari fungsi reproduksi biologis antara perempuan dan laki-laki	Diformulasikan dari kondisi konkrit laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tugasnya	Diformulasikan dari posisi subordinat perempuan yang disebabkan oleh konstruksi sosial budaya
Tujuan	Melindungi fungsi reproduksi dan melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia	Memenuhi kebutuhan dasar. Meningkatkan kondisi perempuan. Meningkatkan kemampuan perempuan	Memenuhi kebutuhan jangka panjang, termasuk perubahan pola pikir. Meningkatkan posisi perempuan atau laki-laki pada sektor publik
Contoh	Perempuan butuh pembalut Laki-laki butuh di khitan	Penolong persalinan terlatih Tempat penitipan anak	Pembagian tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki

Sumber: Nurhaeni (2013:5).

2.3.4 Bentuk Kesenjangan Gender

Gender pada hakikatnya mencakup laki-laki dan perempuan, namun seringkali gender dimaknai sebagai perempuan saja. Hal ini disebabkan karena saat ini perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan, sehingga keberpihakan terhadap perempuan diberi penekanan dan perhatian khusus. Penekanan dan perhatian terhadap perempuan dipandang sangat penting melihat kondisi saat ini bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan (*gap*). Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruksi masyarakat yang dibangun secara sosial dan kultural oleh masyarakat dalam waktu yang lama.

Berbagai kesenjangan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan suatu kondisi di mana terdapat perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan nasional. Ketidakadilan tersebut termanifestasi ke dalam berbagai bentuk tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan tersebut pada akhirnya mengakibatkan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Berbagai bentuk ketidakadilan tersebut adalah sebagai berikut (dalam Djohani, 2008:97).

- a. Subordinasi, dapat diartikan penomorduaan terhadap perempuan atau memposisikan perempuan pada kelas dua dan dinilai lebih rendah dari laki-laki.
- b. Marjinalisasi adalah upaya untuk meminggirkan perempuan dari fungsi-fungsi tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
- c. Stereotipe adalah pemberian label atau sebutan terhadap perempuan yang memojokkan perempuan (*stigma* atau *stereotipe* negatif).
- d. Beban ganda adalah pembebanan tanggung jawab dan kewajiban secara berlebihan.

- e. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perempuan dianggap lemah sehingga menjadi obyek tindakan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

2.3.5 Analisis Gender

Pembangunan pada saat ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan tersebut terkait dengan kesamaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari proses pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu alat yang menjadi dasar untuk menentukan kebijakan atau program yang dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan tersebut. Alat tersebut adalah analisis gender. Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi (Santoso, 2004a:2).

Menurut Achmad (dalam Ihromi, 1995:171), analisis gender adalah suatu usaha yang sistematis untuk mencatat tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan yang membentuk sistem produksi barang dan jasa. Akan tetapi, pengembangan selanjutnya lebih diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih tanggap terhadap kebutuhan perempuan. Analisis gender sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan aktual perempuan, menyangkut kedudukan, peran, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya harus dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Menurut Fakhri (2012:7), tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi ideologi dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Analisis gender diharapkan kesenjangan gender dalam pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan permasalahan dan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Analisis gender sangat penting bagi

pengambil kebijakan atau perencana pembangunan pada setiap sektor dan setiap level pemerintahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisis gender, yaitu sebagai berikut (Santoso, 2004a:3).

- a. Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya. Masalah-masalah yang telah diperoleh, kemudian dikelompokkan sesuai kategori bidang pembangunan dan dibahas bersama-sama lintas sektor terkait untuk menentukan alternatif pemecahan masalah.
- b. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan kondisi objektif. Diskriminasi ini berakar kuat dalam tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.
- c. Mengidentifikasi kesenjangan gender dan aspek partisipasi, akses, kontrol dan manfaat, guna menentukan isu gender secara menyeluruh.
- d. Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi/ tindakan yang diperlukan, yang merupakan kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan.

Ditinjau dari perspektif gender, terdapat empat faktor yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Untuk itu, para perencana dalam mengembangkan perencanaan pembangunan diharapkan tanggap terhadap keempat faktor tersebut, dengan selalu mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan akses, partisipasi kontrol dan manfaat (Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2007:3).

1. Faktor Akses. Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan sumber-sumber daya pembangunan. Keadilan gender disini adalah memperhitungkan kemungkinan memberlakukan cara

yang berbeda bagi perempuan dalam memperoleh akses yang sama dengan laki-laki.

2. Faktor Manfaat. Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Mengingat adanya stereotipe terhadap perempuan dan peran gender yang berbeda, maka apa yang dianggap bermanfaat bagi perempuan, belum tentu dianggap bermanfaat bagi laki-laki.
3. Faktor Partisipasi. Apakah keikutsertaan masyarakat, terutama kelompok perempuan atau suara perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Faktor Kontrol. Apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan pengawasan yang setara terhadap sumber-sumberdaya pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

2.4 Perencanaan Pembangunan

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengatur orang atau kelompok dan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud disini adalah pembangunan. Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan, hingga Sivert (dalam Korten dan Sjahrir, 1988:329), mengatakan bahwa perencanaan merupakan jantung dari proses pembangunan. Waterston (Dalam Conyers, 1984:4) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha yang secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian (Januar, 2006:3), perencanaan adalah keseluruhan proses penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah upaya masyarakat disuatu bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo, dalam Januar, 2006:29). Masih dalam buku yang sama, Katz (dalam Januar, 2008:22) mendefinisikan pembangunan sebagai “*dynamic change of a whole society from one state of national being to another, with the connotation that the latter state is preferable*”. Pengertian pembangunan menurut Katz tersebut, setidaknya terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan itu adalah perubahan yang bersifat dinamis. Kedua, bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau wilayah saja, namun berlangsung dalam seluruh masyarakat. Ketiga, perubahan itu berlangsung secara bertahap dari satu keadaan menuju keadaan yang baru. Keempat, keadaan yang baru itu lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Bryant & White (1987:22), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Definisi tersebut mengandung beberapa implikasi. Pertama, kemampuan (*capacity*). Pembangunan memberikan perhatian terhadap kemampuan terhadap apa yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan. Kedua, kebersamaan (*equity*) atau keadilan sosial. Pembangunan berarti juga pemerataan. Ketiga, kekuasaan (*empowerment*). *Empowerment* berarti pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Keempat, ketahanan atau kemandirian (*sustainability*). Keterbatasan faktor-faktor pembangunan dan tuntutan kebutuhan semakin meningkat, maka sumber daya yang ada haruslah dapat dikelola sedemikian rupa. Kelima, salingketergantungan (*interdependence*). Negara berkembang bergantung kepada negara maju. Namun, negara maju juga membutuhkan negara berkembang. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan timbal balik atau saling ketergantungan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan yang sistematis menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya yang dilakukan secara

sadar untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, perencanaan pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan langkah-langkah dan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.4.2 Pendekatan Belajar Sosial (*Social Learning*)

Pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*) dewasa ini menjadi paradigma utama dalam pembangunan diberbagai negara. Paradigma Pembangunan yang berpusat pada rakyat ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Salah satu ciri khas dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hasil dari pembangunan akan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat sendiri. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan juga akan mendorong proses belajar dalam masyarakat.

Pendekatan proses belajar sosial (*social learning*) merupakan bagian penting dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Friedmann (dalam Korten dan Sjahrir, 1988:250) menegaskan bahwa pembangunan bukanlah suatu produk dari produksi, melainkan dari proses belajar dan perencanaan tidak sekedar sebuah pembuatan rencana tetapi lebih berarti sebagai proses belajar bersama, tidak memberikan tekanan pada dokumen tetapi pada dialog. Dialog merupakan cara belajar paling efektif yang dilaksanakan melibatkan hubungan yang saling mempercayai antara dua pihak atau lebih. Konseptualisasi ulang ini membawa perspektif baru bagi pembangunan dan menyarankan berbagai implikasi penting tentang cara-cara perencanaan yang mendefinisikan kembali partisipasi masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Pendekatan ini bersifat *learning by doing, decentralized, by people, bottom up* dengan politik terbuka (Januar, 2006:4).

Pendekatan proses belajar sosial menurut Chambers (dalam Bryant & White, 1987:315) mengutamakan penajaman sasaran dan pelaksanaan program yang telah ada, menghimpun pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan umpan balik pada penyusunan usulan, perbaikan proses anggaran dan alokasi. Syarat utama dalam pendekatan ini adalah adanya partisipasi dari masyarakat yang muncul dari bawah. Proses belajar sosial dalam proses perencanaan terjadi pada dua tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok (Korten dan Sjahrir, 1988:227). Proses belajar dari tingkat individual berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Individu belajar dengan sejumlah informasi yang diperoleh melalui komunikasi dan partisipasi mereka dalam sistem sosial. Proses belajar sosial juga terjadi pada tingkat kelompok, di mana hasilnya bukanlah transformasi perilaku individu namun transformasi perilaku kelompok. Keanggotaan kolektif dari kelompok akan bertanggung jawab memantau perilaku kelompok dengan mengacu pada tujuan-tujuan kelompok.

Pendekatan belajar sosial merupakan model yang dapat mewujudkan perubahan-perubahan yang inovatif dari bawah. Pendekatan belajar sosial dalam perencanaan memberikan sumbangsih yang besar bagi perjuangan kelompok-kelompok yang termarginalkan dan menuju ke arah transformasi struktur kekuasaan politik pemerintah. Gagasan utama dari perjuangan ini adalah bahwa perencanaan dari bawah dapat menggambarkan dengan tepat kepentingan dan kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.

2.4.3 Kesetaraan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya yang mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Peran serta merupakan bagian dari proses dan definisi pembangunan itu sendiri. Peran serta merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Menurut Bryant & White (1987:269). Peran serta umumnya didefinisikan pengaruh

atau menjadi bagian dalam proses pembangunan. Peran serta masyarakat akan berhubungan dengan manfaat yang akan diterima dari pembangunan.

Isu kesetaraan gender dalam pembangunan muncul ketika terdapat kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima dari adanya pembangunan. Kesenjangan juga terlihat dari adanya perbedaan prioritas, hambatan dan pilihan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan pembangunan. Kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan dapat diwujudkan dengan adanya kesamaan peluang dan akses untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuan dari kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan adalah agar perempuan mampu berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama.

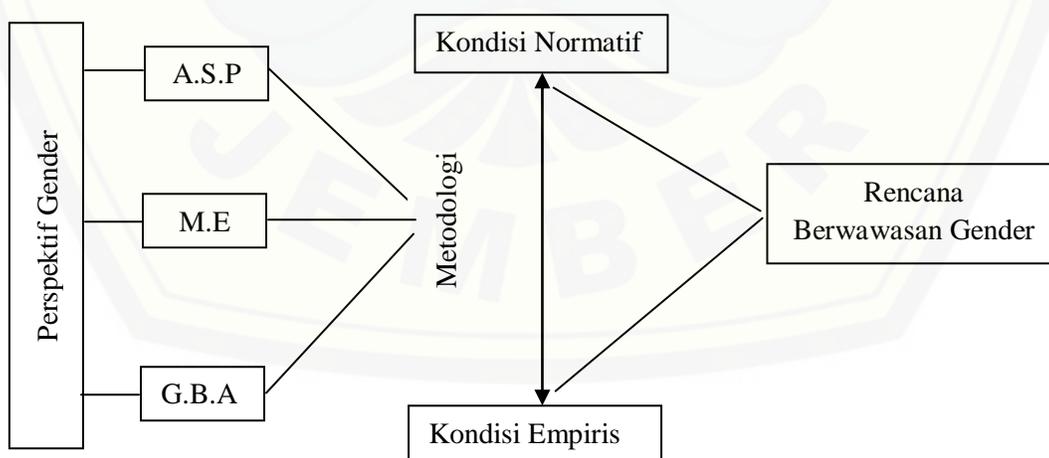
Permasalahan kesetaraan gender dalam pembangunan mendapat perhatian dari dunia internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan atau target dari MDG's (*Millenium Development Goal's*). *Millenium Development Goal's* merupakan kesepakatan internasional yang merumuskan delapan butir tujuan/ sasaran program pembangunan, untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini delapan target dari MDG's.

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Memenuhi standar pendidikan dasar bagi setiap orang;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Mengurangi angka kematian bayi;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Peran serta perempuan dalam perencanaan membawa implikasi luas kepada perempuan. Peran serta perempuan dalam perencanaan akan berdampak terhadap posisi perempuan dan apa yang akan mereka terima dari adanya pembangunan. Peran serta perempuan dalam perencanaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat

perempuan mempunyai pengalaman-pengalaman bersama dikalangan mereka dalam proses pembangunan. Berkaitan dengan peran serta perempuan, Rahardjo (dalam Ihromi, 1995:4), memberikan tinjauan tentang permasalahan dan prospektif perempuan. Ia berpendapat bahwa perempuan menghadapi diskriminasi ganda, yaitu diskriminasi diskriminasi yang disebabkan oleh jenis kelaminnya dan oleh posisi kelasnya. Selanjutnya Korten dan Sjahrir (1988:286) mengemukakan dua kemungkinan yang mempengaruhi perempuan untuk berperan serta, yaitu pengaruh jenis kelamin atau kelas mereka. Jika pemikiran pertama yang diberlakukan, akan ditargetkan yang menjadi prioritas adalah program pembangunan kepada dan untuk dan membantu perempuan. Sedangkan jika pada pemikiran kedua, wanita diperlakukan dalam konteks kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk kelas sosial mereka berada.

Peningkatan partisipasi dan peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut dapat dikembangkan melalui perencanaan yang berwawasan gender. Proses perencanaan yang berwawasan gender dapat dilihat melalui gambar di bawah ini Tjokrowinoto, 1996:72).

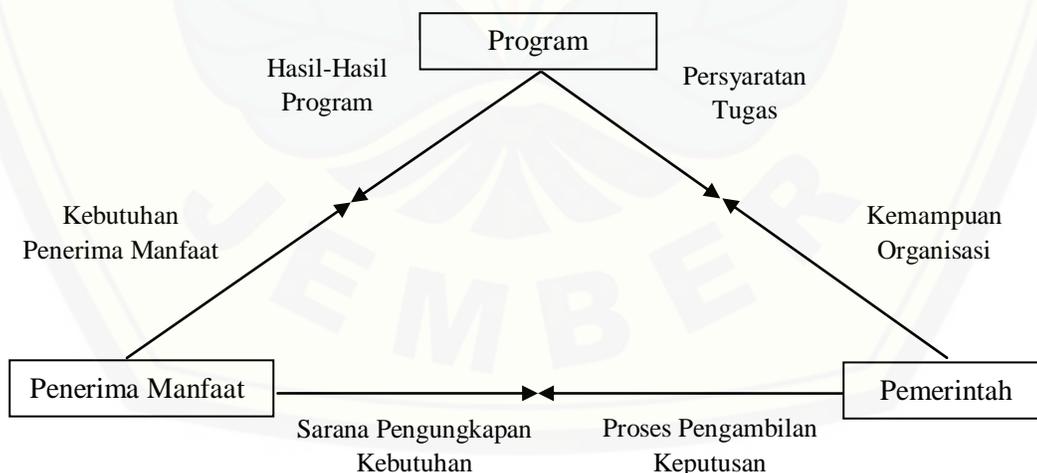


Gambar 2.1 Diagram Proses Perencanaan Berwawasan Gender
(Sumber: Tjokrowinoto, 1996:72)

Dari gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa teknik dan derajat analisis yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

- Analisis Situasi Perempuan (A.S.P), terutama untuk mengidentifikasi situasi gender pada tingkat makro.
- Monitoring dan Evaluasi (M.E), untuk mengungkapkan kaitan situasi gender dengan program pembangunan tertentu.
- Gender Based Analysis* (G.B.A), terutama untuk mengidentifikasi situasi perempuan dalam derajat mikro.

Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara penerima manfaat, program pembangunan itu sendiri dan pemerintah (Korten dan Sjahrir, 1988:241). Dengan istilah lebih khusus, program pembangunan akan gagal jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima manfaat dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan pemerintah dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh penerima manfaat pembangunan serta proses pengambilan keputusan dari organisasi.



Gambar 2.2 Skematis Persyaratan Kelayakan Program Pembangunan
(Sumber: Korten dan Sjahrir, 1988:241)

Dari gambar di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan antara ketiga elemen tersebut, khususnya antara pemerintah dan penerima manfaat. Proses pengambilan keputusan dan pengungkapan kebutuhan menjadi faktor penentu sejauh mana program pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Sebagai pihak penerima manfaat, peran serta dari perempuan dalam perencanaan menjadi mutlak dan penting dibutuhkan untuk mengungkapkan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan yang disertai dengan pengungkapan kebutuhan menjadi penting untuk menjamin adanya hubungan antara program pembangunan dengan kebutuhan dari penerima manfaat.

2.4.4 Perencanaan Responsif Gender

Menurut Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2007:3), perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan pembangunan. Melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator. Tujuan dari perencanaan responsif gender adalah memastikan laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan, sehingga tidak ada peminggiran terhadap salah satu pihak dalam proses pembangunan.

Perencanaan responsif gender dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan responsif gender bukan hanya fokus pada pengarusutamaan gender saja, tetapi bagaimana perencanaan secara keseluruhan

dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki dapat dipahami menjadi beberapa konteks (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dkk, 2012:8). Pertama, perencanaan responsif gender bukanlah kegiatan dan program pembangunan yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki. Kedua, perencanaan responsif gender sebagai pola perencanaan yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki. Ketiga, perencanaan responsif gender bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran. Keempat, Perencanaan responsif gender tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan. Kelima, Perencanaan responsif gender bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana sama untuk laki-laki dan perempuan.

2.5 Perencanaan Pembangunan Desa

2.5.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa

Setiap level pemerintahan, dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah pasti melaksanakan perencanaan pembangunan, tak terkecuali desa. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dalam hierarki pemerintahan di Indonesia. Zakaria (dalam Sumpeno, 2008:3) mendefinisikan desa sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Definisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut.

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Terkait dengan pembangunan desa, Ndraha (1990:100) memberikan perbedaan terhadap beberapa istilah yang harus dibedakan, yaitu pembangunan pedesaan (*rural development*) dan pembangunan desa (*village development*). Pembangunan pedesaan berarti pembangunan nasional yang berlokasi di desa, sedangkan pembangunan desa berarti pembangunan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa mempunyai nilai khas dibandingkan dengan proses pembangunan pada tingkatan wilayah lainnya, di mana pembangunan desa menjunjung tinggi nilai gotong royong.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses penentuan alternatif kegiatan atau program berdasarkan sumberdaya yang tersedia untuk menyelenggarakan pembangunan pada tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

2.5.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Perencanaan desa dimaksudkan untuk menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut (dalam Sumpeno, 2008:34).

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Pembangunan desa menurut Adisasmita (2006:4), adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan gotong royong dan swadaya. Lebih lanjut lagi, Adisasmita (2006:19) menjelaskan mengenai ruang lingkup pembangunan desa. Ruang lingkup pembangunan desa adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lain-lain).
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
- d. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).
- e. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

Suatu perencanaan selalu berkesinambungan dan bertahap serta saling terkait satu dengan yang lainnya. Perencanaan pembangunan desa disusun secara bejangka, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan rancangan atau kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan pendanaan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

2.5.3 Perencanaan Desa Responsif Gender

Setiap proses pembangunan nasional harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, desa memiliki peran yang paling strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga desa menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pada tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal dari proses pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Wujud dari kesetaraan dan keadilan dalam perencanaan pembangunan desa adalah perencanaan responsif gender.

Pada kenyataannya, belum semua pemerintah desa memahami konsep gender maupun kesetaraan dan keadilan gender. Secara umum dapat dikemukakan bahwa baru 20 persen dari keseluruhan perangkat desa yang mengetahui makna gender dari sudut pandang sosiologis. Umumnya mengartikan gender sebagai perempuan, bukan sebagai peran yang dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan yang saling dipertukarkan (dalam Darmawan, 2006:45). Oleh karena itu pemahaman pemerintah desa tentang konsep gender sangat penting, Artinya, penyelenggaraan pemerintahan desa memasukkan peran serta kedua belah pihak, sehingga aspirasi dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan serta dapat terwujud perencanaan desa yang responsif gender.

Proses perencanaan dalam pembangunan desa terdiri dari beberapa tahap dan kegiatan. Untuk mewujudkan perencanaan desa yang responsif gender, setiap tahapan dan kegiatan dalam perencanaan desa harus sebisa mungkin responsif gender. Dengan begitu tahapan pembangunan selanjutnya juga responsif gender dan dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Praktik perencanaan

pembangunan desa yang responsif gender dapat dilakukan dengan cara berikut ini (Djohani, 2008:99).

1. Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan Perempuan

Selama ini pembahasan dalam perencanaan pembangunan desa selalu bersifat umum dan tidak menggambarkan perbedaan kebutuhan dan permasalahan dari perempuan maupun laki-laki.

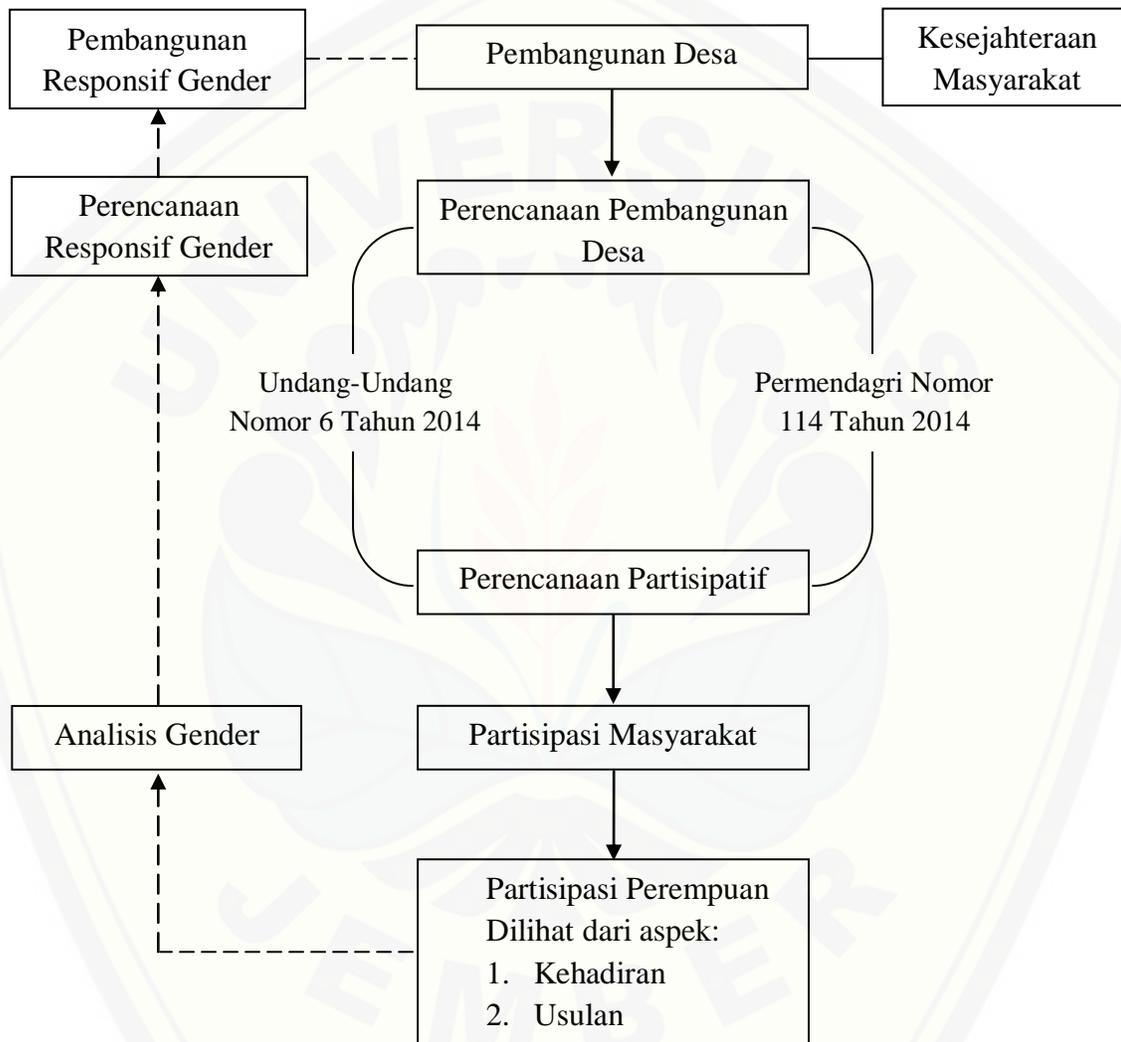
2. Penggunaan Data Terpisah antara Perempuan dan Laki-laki

Data dan indikator terpisah antara laki-laki dan perempuan merupakan persyaratan penting dalam menerapkan perencanaan yang berpihak kepada perempuan. Desa sebaiknya memiliki data dasar (*base line*) keluarga miskin, termasuk jenis kelamin dan usianya serta profilnya (seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan) untuk menjadi acuan dalam menetapkan sasaran program pembangunan bagi masyarakat.

3. Program dan Anggaran Berbasis Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Berbicara mengenai anggaran yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, maka kita akan melihat proses dan hasil. APBDes adalah wujud kebijakan pembangunan paling konkrit karena menyangkut alokasi sumberdaya yang dimiliki. Proses penyusunannya dilakukan melalui forum Musrenbang.

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2.5 Kerangka Berfikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian, karena metode penelitian digunakan untuk mencari kebenaran atas suatu permasalahan. Menurut Bogdan dan Taylor yang diterjemahkan oleh A. Khozin Affandi (1993:25), metode berarti proses, prinsip, dan prosedur yang dipakai dalam mendekati persoalan-persoalan dan usaha mencari jawabannya. Penelitian pada hakikatnya merupakan usaha atau proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Dari definisi-definisi tersebut maka metode penelitian adalah cara berfikir untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Sedangkan Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dan Akbar, 2009:41).

Pada metodologi penelitian, terdapat teknik-teknik yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut ini.

1. Pendekatan dan tipe penelitian
2. Fokus penelitian
3. Lokasi dan waktu penelitian
4. Data dan sumber data
5. Teknik pemilihan informan
6. Teknik pengumpulan data
7. Teknik menguji keabsahan data
8. Teknik analisis data

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan gejala atau fenomena sosial untuk memperoleh jawaban atas permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6), penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan Creswell (dalam Gunawan, 2013:82) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut.

“Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan) atau keduanya”.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Creswell, 2010:292), penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses investigatif yang di dalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan dan mengklasifikasikan objek penelitian. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi dan tingkah laku manusia dalam kondisi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan *key instrument* dalam kegiatan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang juga disebut juga *taxonomic research* bertujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Faisal, 2005:20). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen catatan lapangan disusun peneliti, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka (Gunawan, 2013:87).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Bagaimanapun fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batasan penelitian. Oleh karena itu, dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan tepat (Basrowi dan Suwandi, 2008:28). Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan (Moleong, 2004:237). Pertama, penetapan fokus penelitian membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak, kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang menyaring mengalir masuk. Tujuan penetapan fokus ini bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan mempunyai cakupan yang jelas sesuai dengan judul penelitian.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti menetapkan fokus penelitian pada partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015 ditinjau dari perspektif gender. Penentuan fokus ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan yang jelas dalam penelitian.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam suatu penelitian, tempat dan waktu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena akan berpengaruh terhadap proses dan hasil penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Sedangkan waktu penelitian merupakan kurun waktu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Batasan waktu penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada bulan Juni-September Tahun 2015.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian dan data merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Data dalam penelitian digunakan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan. Menurut Riduwan (dalam Siswanto, 2012:54), data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004:112), data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data (Wasito, 1997:69). Data primer biasanya dihasilkan dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, angket dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan terkait proses perencanaan pembangunan desa. Proses wawancara untuk memperoleh data primer dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, ketua dan kader PKK serta perempuan di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya secara langsung. Peneliti bertindak sebagai pemakai data (Wasito, 1997:69). Data sekunder dapat berupa dokumentasi, arsip, catatan-catatan maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui beberapa dokumen sebagai berikut.

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa Sumberagung, yang memuat tentang prioritas kegiatan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sumberagung. Selain itu, juga terdapat dokumentasi berupa berita acara dan daftar hadir pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Data Statistik Desa dan Profil Desa Sumberagung, yang memuat informasi dan seluk beluk mengenai Desa Sumberagung yang berguna bagi peneliti untuk mengenal lokasi penelitian.
- c. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang diterbitkan atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan, di mana dalam buku tersebut peneliti memperoleh data tentang pencapaian IPM, IPG dan IDG secara Nasional maupun spesifik menurut Provinsi hingga Kabupaten/ Kota.
- d. Beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang memberikan data dan informasi kepada peneliti tentang perencanaan pembangunan desa.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi informan berfungsi sebagai *internal sampling*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen, dalam Moleong, 2001:90). Penentuan informan didasarkan pada pengetahuannya tentang data atau informasi yang diperlukan. Peneliti mencari orang-orang yang benar-benar tahu tentang informasi yang diperlukan.

Tenik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive* dan *snowball*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. *Snowball* adalah teknik pengambilan sampel, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal tersebut dilakukan sampai peneliti merasa sudah mendapatkan informasi yang telah diharapkan. Menurut Moleong (2004:90), usaha untuk mencari informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat dan lain-lain);
- b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menetapkan beberapa informan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengetahui partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumberagung, yaitu sebagai berikut.

- a. Ibu Winarsih. Beliau adalah informan pertama yang diwawancara oleh peneliti. Beliau merupakan perangkat desa, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum). Beliau juga merupakan kader PKK dan Posyandu.
- b. Ibu Komsiyatin. Beliau merupakan perangkat desa, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai sekretaris PKK. Posisi beliau dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai perwakilan dari PKK dan Dusun Tambakrejo.
- c. Ibu Rasiyem. Beliau merupakan bendahara PKK. Posisi beliau dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai perwakilan dari PKK dan Dusun Banjarejo Barat.

- d. Ibu Puji Hernanik. Beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumberagung.
- e. Ibu Anik. Beliau merupakan kader PKK dan salah satu warga Dusun Banjarejo Tengah.
- f. Bapak Tugiran. Beliau merupakan Kepala Desa Sumberagung. Posisi beliau dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai narasumber dalam forum Musrenbang Desa Sumberagung dan penanggungjawab dari perencanaan pembangunan desa.
- g. Bapak Sunarto. Beliau merupakan perangkat desa, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa. Posisi beliau dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai pimpinan forum Musrenbang Desa Sumberagung.
- h. Bapak Endar. Beliau merupakan perangkat desa, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan (Kaur Ekbang). Posisi beliau dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai sekretaris dan notulen forum Musrenbang Desa Sumberagung.
- i. Bapak Dedi Junadi. Beliau merupakan Sekretaris Camat (Sekcam) Sumberbaru.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dari lapangan, dilakukan dengan teknik tertentu sesuai dengan tujuannya. Teknik yang digunakan tergantung pada beberapa faktor terutama jenis data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2004:135), maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain; merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang demikian sebagai dialami di masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peliti sebagai pengecekan anggota. Dalam pengumpulan data dengan wawancara, peneliti berusaha menyelidiki suatu isu yang berhubungan dengan marginalisasi individu-individu tertentu (Creswell, 2010:28). Dalam wawancara, terdapat beberapa tipe yang membedakan wawancara yang akan dilakukan. Menurut Moleong (2004: 138), terdapat dua macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur, adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara terstruktur bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan cermat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif dengan pertanyaan yang sama dan ini merupakan yang sangat penting.
- b. Wawancara tidak terstruktur, adalah dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan dapat dijawab bebas oleh informan tanpa terikat pada pola-pola tertentu. Wawancara jenis ini digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku dan bukan informasi tunggal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang digunakan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Kemudian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158), dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa arsip-arsip lembaga terkait, peraturan daerah, foto-foto, catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan lain-lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2015.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan dan kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Moleong (2001:173) menyatakan sebagai berikut.

”untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*)”.

Teknik menguji keabsahan data menurut Moleong (2001:175) terdapat 4 jenis, yaitu ketekunan peneliti, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Moleong (2001:178) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Moleong, 2001:178), membagi triangulasi menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut..

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2001:178). Hal itu dapat di capai dengan jalan: (1) membandingkan hasil pengamatan atau observasi dengan data wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah jenis triangulasi dengan dua strategisi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi Penyidik

Triangulasi Penyidik adalah jenis triangulasi yang memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali dengan derajat kepercayaan data. Pemanfaatan peneliti lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data.

d. Triangulasi Teori.

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2001:179) berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Patton (dalam Moleong, 2001:179) menyatakan bahwa triangulasi teori dapat dilaksanakan atau dimaksudkan untuk penjelasan banding (*rival explanations*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Tujuan dari pemilihan triangulasi sumber ini adalah agar penelitian memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang tinggi, sehingga hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara peneliti melakukan triangulasi sumber agar mendapatkan data yang valid, adalah sebagai berikut.

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menghimpun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Data atau informasi yang ada dalam dokumen tersebut kemudian peneliti bandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan. Peneliti membandingkan data tentang usulan kegiatan dan program pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan desa dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan. Setelah dibandingkan, terdapat kesesuaian data antara dokumen dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis informan. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di depan umum seperti dibalai desa, kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan informan secara pribadi di rumahnya. Setelah itu peneliti membandingkan hasil wawancara di depan umum dengan hasil wawancara secara pribadi. Setelah dibandingkan, data atau informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara pribadi lebih dapat dipercaya dan lebih lengkap.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Situasi penelitian mempengaruhi informan untuk memberikan informasi kepada peneliti. Untuk memastikan bahwa informasi yang berikan informan tersebut valid, peneliti membandingkan pernyataan informan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu atau pada situasi lain. Peneliti membandingkan

informasi yang diberikan oleh informan melalui wawancara pada hari aktif kerja, di mana informan sibuk dengan aktivitas dibandingkan dengan wawancara pada hari libur, di mana informan memiliki waktu luang yang lebih banyak.

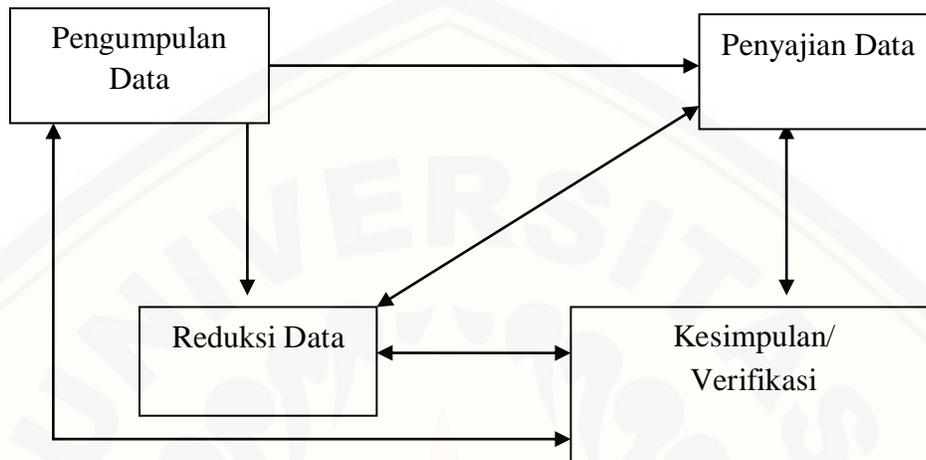
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. Keadaan dan perspektif dari informan mempengaruhi terhadap informasi yang diberikan kepada informan. Informasi yang diperoleh peneliti dari informan yang merupakan kader PKK, tentu saja berbeda dengan informasi yang diberikan oleh informan seorang laki-laki yang tidak memandang pembangunan dari perspektif perempuan, di mana laki-laki tidak akan lebih memahami kepentingan, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam pembangunan.

3.8 Teknik Analisis Data

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul dipelajari serta ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Gunawan (2013:2009) mendefinisikan analisis data sebagai sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin diteliti. Kemudian analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan data yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang kemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahapan atau alur analisis data

model interaktif dari Miles dan Huberman (1992:20) dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1992:20)

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:16) yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi terdiri atas tiga tahapan/ alur, yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang didapat dari penelitian atau pengamatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus, selama kegiatan penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, dilakukan tahapan reduksi data selanjutnya (membagi, meringkas, mengkode). Reduksi data/ proses transformasi ini terus menerus dilakukan sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.